

### ပ်ခ်ာက်ရွှာ ၅ပာပ်ရှဒ် ကက် PEMERINTAH PROVINSI BALI ကာအ၏ ပ်ကျွက်

#### **BADAN PENGHUBUNG**

website: www.baliprov.go.id

Jakarta, 18 Januari 2022 Kepada Yth. Inspektur Provinsi Bali di – Tempat

#### **SURAT PENGANTAR**

NOMOR: B.45.700/91 / TU/ Banhub

No	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	LKjIP Tahun 2021 Badan Penghubung Provinsi Bali	1 (satu) gabung	Dengan hormat, dikirim untuk dapat di review sebagaimana mestinya.





## PEMERINTAH PROVINSI BALI



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI
TAHUN 2021

#### KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Bali disusun untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk itu disusunlah LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021.

Tujuan dari penyusunan LKjIP adalah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan program kerja yang diselenggarakan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan dalam mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu laporan ini disusun dalam rangka menyampaikan hasil evaluasi dan análisis realisasi kinerja kegiatan dari pelaksanaan kebijakan dan program Badan Penghubung Provinsi Bali serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam Tahun Anggaran 2021.

Penyusunan LKjIP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

BADAN PENGHUBUNG

Jakarta, 5 Januari 2022

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI BALI

ARLFIN EFENDI, ST., MT

P. 19710714 200003 1 003

#### **DAFTAR ISI**

# KATA PENGANTAR DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I	:	PEN	NDAHULUAN	1
		1.1.	LATAR BELAKANG	1
		1.2	KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI	1
			DAN STRUKTUR ORGANISASI	
BAB II	:	PEF	RJANJIAN KINERJA	4
		2.1	TELAAH VISI MISI PEMERINTAH PROVINSI BALI	4
		2.2	VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN	
			BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI	21
		2.3.	CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN	22
			SASARAN	
		2.4	INDIKATOR KINERJA UTAMA	24
		2.5	PENETAPAN KINERJA	25
BAB III	:	AKU	JNTABILITAS KINERJA	26
		3.1	EVALUASI KINERJA	26
		3.2	ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA	26
		3.3	PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN	
			TAHUN SEBELUMNYA	28
		3.4	PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN	
			TAHUN 2020 DENGAN TARGET RENSTRA	28
		3.5	ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT	29
		3.6	REALISASI ANGGARAN	32
BAB IV	:	PEN	NUTUP	35

#### LAMPIRAN

- 1. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2021
- 2. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2021
- 3. RENCANA STRATEGIS
- 4. INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 5. RENCANA KERJA TAHUNAN 2021
- 6. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2021
- 7. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2022

#### **DAFTAR TABEL**

TABEL 1 : VISI MISI TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI PROVINSI BALI	4
TAHUN 2019 - 2023	
TABEL 2 : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN RPJMD PROVINSI BALI	13
TAHUN 2019 – 2023	
TABEL 3 : PENETAPAN KINERJA	25
TABEL 4 : CAPAIAN SASARAN	27
TABEL 5 : PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN	28
SEBELUMNYA	
TABEL 6 : PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2020 DENGAN	29
TARGET RENSTRA	
TABEL 7 : KUANTITAS SDM	29
TABEL 8 : REALISASI PENDAPATAN	33
TABEL 9 : REALISASI BELANJA LANGSUNG	34

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan kepemerintahan yang baik (*good governance*) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

Dalam LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali disajikan penjelasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator kinerja yang dipakai pada pengukuran ini adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome) dari kegiatan Tahun 2021. Sedangkan manfaat (benefit) belum dapat diukur karena memerlukan waktu lama untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2021 tercapai 106,12% sedangkan capaian realisasi anggaran sesuai dengan yang tertuang dalam DPA Tahun 2021 mencapai 92,29%. Pencapaian kinerja ini didorong adanya kerja sama yang baik dari seluruh aparatur yang ada di Badan Penghubung Provinsi Bali, serta adanya kesungguhan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Jakarta, 2022

#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

#### I. 1 Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya urusan-urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Bali di Jakarta baik yang meliputi urusan administratif, teknis maupun koordinatif, peran dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali di Ibu Kota Negara Jakarta semakin strategis dalam memberikan pelayanan terhadap kelancaran penyelenggaraan urusan-urusan Pemerintah Daerah baik internal maupun eksternal. Untuk mengevaluasi pelaksanaan kinerja yang telah berjalan maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja.

Asas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan setiap penyelenggaran Negara harus dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan itu Badan Penghubung Provinsi Bali di Jakarta menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2021 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan LKjIP ini mempunyai manfaat sangat penting disamping sebagai dokumen pelaksanaan perencanaan taktis strategis, juga untuk menunjukkan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) selama satu tahun anggaran. Sasaran penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Bali berupa pelaksanaan kegiatan sebagaimana tertuang dalam DPA Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun Anggaran 2021.

#### I. 2 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Penghubung mempunyai tugas untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan

pemerintah pusat. Sesuai dengan Tugas Badan Penghubung secara garis besar memberikan pelayanan sebagai berikut:

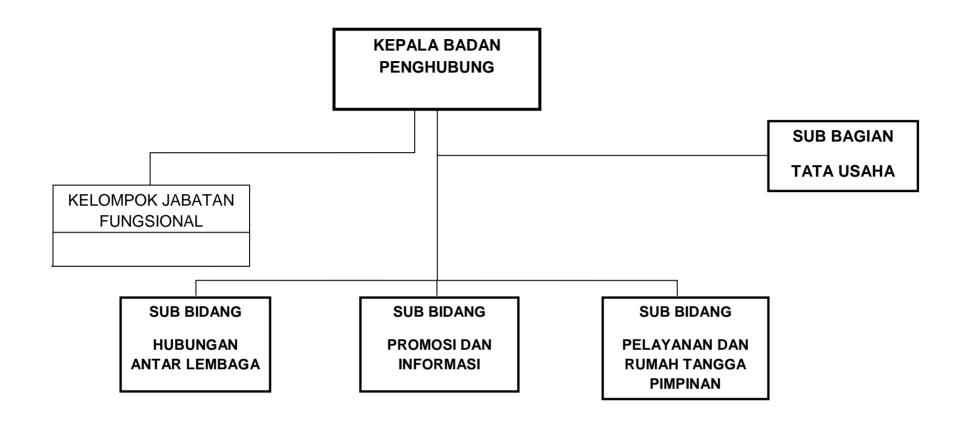
- 1. Mempermudah koordinasi pemerintah daerah ke pusat;
- 2. Memberikan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta;
- 3. Melayani pimpinan daerah yang melaksanakan dinas ke Ibu Kota Jakarta;
- 4. Sebagai sarana promosi dan informasi seni, budaya dan pariwisata Bali di Jakarta;
- 5. Menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan pendapatan dari Wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

Fungsi, Badan Penghubung Provinsi Bali mempunyai empat fungsi antara lain:

- 1. Perumusan kebijakan teknis dalam penunjang urusan koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat;
- 2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas Badan.
- 3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha; dan
- 4. Penyelenggaran fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Bali terdiri dari :

- 1. Kepala
- 2. Sub Bagian Tata Usaha
- 3. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga
- 4. Sub Bidang Promosi dan Informasi
- 5. Sub Bidang Pelayanan dan Rumah Tangga Pimpinan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.



#### BAB II

#### PERJANJIAN KINERJA

#### 2.1 TELAAH VISI MISI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BALI

Strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah Provinsi Bali dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Tahun 2019-2023. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi.

Strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, maka strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam RPJMD Provinsi Bali 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1

#### Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Provinsi Bali Tahun 2019-2023

#### VISI: "NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI" MELALUI POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA

MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD	STRATEGI					
MISI 1. MEMASTIKAN TERPENUHINYA KEBUTUHAN PANGAN, SANDANG, DAN PAPAN DALAM JUMLAH DAN KUALITAS YANG MEMADAI BAGI KEHIDUPAN KRAMA BALI								
Terpenuhinya kebutuhan dasar Krama Bali dengan kualitas yang layak	1	Meningkatnya Ketahanan pangan bagi Krama Bali	1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan				

			2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat
	2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	1	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali
			2	Peningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat masih menggunakan produk sandang Bali
	3	Meningkatnya rasio rumah tangga Krama Bali memiliki rumah layak huni	1	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali
		layak IIdiii	2	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali
MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD		STRATEGI
	4	Terkendalinya Stabilitas Harga Pangan	1	Menguatkan kebijakan pengendalian stabilitas harga pangan
			2	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali
	$\mathbf{D}$	AYA SAING PERTANIA		IGAN, MENINGKATKAN DAN MENINGKATKAN
Terwujudnya swasembada pangan Krama Bali dan daya saing pertanian	1	Meningkatnya diversifikasi dan optimalisasi potensi sumberdaya	1	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan
pertunian		pangan local	2	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah di Provinsi Bali

			3	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport
	2	Meningkatnya kualitas hasil pertanian Krama Bali	1	Pembangunan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor
			2	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas
	3	Meningkatnya kapasitas SDM pertanian Krama Bali	1	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian
MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD		STRATEGI
YANG TERJANGKAU DIDUKUNG DENGA	J, M N P	ANGKAN PELAYANAN MERATA, ADIL DAN B PENGEMBANGAN SIS KRAMA BALI BERBA	ERI FEN	M DAN DATA BASE
YANG TERJANGKAU DIDUKUNG DENGA	J, M N P	MERATA, ADIL DAN B ENGEMBANGAN SIS	ERI FEN	KUALITAS SERTA M DAN DATA BASE
YANG TERJANGKAU DIDUKUNG DENGA RIWAYAT KESEHAT Meningkatnya derajat kesehatan	J, N N P AN	MERATA, ADIL DAN B ENGEMBANGAN SIS' KRAMA BALI BERBA Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi	ERI FEN SIS	KUALITAS SERTA M DAN DATA BASE KECAMATAN.  Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan
YANG TERJANGKAU DIDUKUNG DENGA RIWAYAT KESEHAT Meningkatnya derajat kesehatan	J, M N P AN	MERATA, ADIL DAN B ENGEMBANGAN SIS' KRAMA BALI BERBA Terjaminnya akses pelayanan kesehatan bagi seluruh Krama Bali Meningkatnya standar kualitas pelayanan kesehatan Krama	ERI FEN SIS	KUALITAS SERTA M DAN DATA BASE KECAMATAN.  Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan

MELAKSANAKAN W	A. II	B BELAJAR 12 TAHU	N	
Terwujudnya wajib belajar 12 tahun yang berkualitas	1	Meningkatnya pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau, merata, adil, dan berkualitas	1	Penyelenggaraan proses pelayanan pendidikan yang berkualitas
	2	Terwujudnya wajib belajar 12 tahun	2	Pendidikan gratis 12 tahun
PENDIDIKAN MENE	NG	ANGKAN SISTEM PE AH BERBASIS KEAGA I DESA PEKRAMAN/I	AM.	AAN HINDU DALAM
Terwujudnya karakter Krama Bali unggul sebagai individu dan sosial yang berbasis kearifan lokal	pe be pa da m	eningkatnya elayanan pendidikan erbasis Keagamaan ada tingkat sekolah asar sampai dengan enengah dalam entuk pasraman	pe Hi da	endorong pemerintah pusat endidikan berbasis Agama indu tingkat sekolah dasar an Menengah masuk dalam stem pendidikan Nasional
MISI/TUJUAN		SASARAN RPJMD		STRATEGI
BERDAYA SAING TI BERMUTU, PROFES	NG SIOI 3 Di	NAL DAN BERMORAL IKEMBANGKAN BERI	AS SE	DAN BERINTEGRITAS: CRTA MEMILIKI JATI DIRI
Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi		eningkatnya daya ing SDM Krama Bali	ka Ma	eningkatan kapasitas dan apabilitas Sumber Daya anusia (SDM) Krama Bali bagai Enterpreneur
KONPREHENSIF DA	N /I	RAN, TUMBUH DAN E	KE	IAN SOSIAL SECARA HIDUPAN KRAMA BALI KEMBANG SAMPAI AKHIR
Terwujudnya kesejahteraan sosial Krama Bali	ku ke da	eningkatnya nalitas Pemenuhan ebutuhan hidup nsar yang layak rama Bali	m su se	emerintah daerah bersama asyarakat mengoptimalkan amberdaya yang dimiliki bagai bagian dari jaminan osial Krama Bali
		ILKAN TENAGA KERJ JITAS DAN MEMILIKI		ANG KOMPETEN, YA SAING TINGGI SERTA

MEMPERLUAS AKS NEGERI	ES KESEMPATAN KERJA	A DI DALAM DAN DI LUAR
Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	<ul> <li>Meningkatnya kompetensi tenaga kerja</li> <li>Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri</li> </ul>	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global
PERLINDUNGAN TE DIJANGKAU, BERM	MBANGKAN SISTEM JAI CNAGA KERJA YANG KON IUTU, DAN TERINTEGRA M DAN DI LUAR NEGERI	
Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Peningkatan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenaga Kerjaan
MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD	STRATEGI
PELINDUNGAN, PE	•	GAN DAN PEMANFAATAN DAN BUDAYA KRAMA BALI   1 Melembagakan dan menginternalisasikan nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal
		2 Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali
		3 Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan
		4 Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya
	<u> </u>	PAN KRAMA BALI SECARA

SAKALA DAN NISKALA BERDASARKAN NILAI-NILAI FILSAFAT SAD KERTIH YAITU ATMA KERTIH, DANU KERTIH, WANA KERTIH, SEGARA KERTIH, JANA KERTIH, DAN JAGAT KERTIH						
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	kualit kehid	ngkatnya tas tata upan Krama Bali sarkan nilai-nilai Kerthi	1	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura		
			2	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama.		
MISI/TUJUAN	SAS	SARAN RPJMD		STRATEGI		
MISI 12. MEMPERK PAKRAMAN/DESA A KEHIDUPAN KRAMA DAN PALEMAHAN	ADAT D	DAN SUBAK DALAI	M MEN			
Terwujudnya Penguatan Desa Adat dalam menyelenggarakan kehidupan Krama Bali berdasarkan Sad Kerthi	kedud	uatnya dukan, tugas dan i Desa Adat dan k		Penguatan kedudukan, tugas dan fungsi Desa Adat dan Subak		
MISI 13. MENGEMB BARU BERBASIS BU TERINTEGRASI ANT	JDAYA	DAN BERPIHAK K	KEPADA	A RAKYAT YANG		
Berkembangnya destinasi dan produk pariwisata budaya berbasis komunitas		Meningkatnya kualitas destinasi pariwisata budaya berbasis komunitas	1	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya sebagai objek wisata		
		Berkembangnya produk pariwisata kreatif dan inovatif berbasis budaya di kabupaten/kota Provinsi Bali	2	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi		
	ARA BE	ERSINERGI ANTAR	KABU	BALI DI DALAM DAN DI PATEN/KOTA SE-BALI IFITAS BARU		
Meningkatnya pasar pariwisata	pariw	ngkatnya pasar isata Bali di domestik dan		Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan		

Bali	globa	al		bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali		
MISI 15. MENINGKA KEPARIWISATAAN S			AYANAN			
Meningkatnya kualitas pelayanan kepariwisataan	1	Meningkatnya tingkat kepuasan wisatawan	1	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata		
	2	Meningkatnya Kualitas SDM Pariwisata	1	Peningkatan kualitas SDM Pariwisata melalui pelatihan- pelatihan sesuai pasar kerja		
MISI/TUJUAN	SA	SARAN RPJMD	STRATEGI			
			2	Memperkuat dukungan regulasi perlidungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenagakerjaan di sektor pariwisata		
PEREKONOMIAN BA BALI DENGAN MEM	MISI 16. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN PUSAT-PUSAT PEREKONOMIAN BARU SESUAI DENGAN POTENSI KABUPATEN/KOTA DI BALI DENGAN MEMBERDAYAKAN SUMBER DAYA LOKAL UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM ARTI LUAS					
Terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali	1	Meningkatnya Investasi yang lebih merata di wilayah Bali	1	Mengembangkan Bali Timur dan Bali Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Provinsi Bali		
	2	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Lokal	1	Mengembangkan Pertokoan Modern berbasis ekonomi lokal		
MISI 17. MEMBANGUN DAN MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH BERBASIS BUDAYA (BRANDING BALI) UNTUK MEMPERKUAT PEREKONOMIAN KRAMA BALI						

Berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali	1	Meningkatnya kualitas produk IKM branding Bali berorientasi Ekspor	1	Mengenalkan, mempromosikan /mengkampanyekan seluruh produk Bali dengan bran Bali di pasar lokal dan ekspor
	2	Meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah Krama Bali	2	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor
MISI/TUJUAN	SA	SARAN RPJMD		STRATEGI
MISI 18. MENINGKA				
LAUT DAN UDARA) S ANTAR WILAYAH UN SERTA AKSES DAN	NTUK	MENDUKUNG PEM	IBANGU	JNAN PEREKONOMIAN
Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur	kual	ingkatnya itas pelayanan sportasi	1	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali
darat, laut dan udara secara terintegrasi dan terkoneksi mendukung pertumbuhan perekonomian baru  MISI 19. MENGEMB	A NICO	ZANI CICATIZNA IZIZANA	2	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan public

DITOPANG DENGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA PRASARANA YANG MEMADAI UNTUK MENJAGA KEAMANAN DAERAH DAN KRAMA BALI SERTA KEAMANAN PARA WISATAWAN						
Terwujudnya stabilitas keamanan dan kenyamanan Krama Bali dan Wisatawan	1	Meningkatnya rasa aman dan nyaman Krama Bali dan Wisatawan melakukan aktivitas kehidupannya.	1	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman		
	2	Meningkatnya rasa aman dan nyaman wisatawan	2	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata		

MISI/TUJUAN	SASARAN RPJMD		STRATEGI	
MISI 20. MEWUJUDKAN KEHIDUPAN KRAMA BALI YANG DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN DENGAN MEMPERKUAT BUDAYA HUKUM, BUDAYA POLITIK DAN KESETARAAN GENDER DENGAN MEMPERHATIKAN NILAI- NILAI BUDAYA BALI				
Terwujudnya tata kehidupan Krama Bali yang Madani sesuai dengan nilai-nilai Budaya Bali	Meningkatnya peran serta Krama Bali dalam ketaatan hukum dan menjalankan hak- hak konstitusi	2	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali Kesetaraan Gender	
	dengan cara-cara demokratis ANGKAN TATA KEHIDU KUNGAN YANG BERSIH		*	
WILAYAH DAN LINGKUNGAN YANG BERSIH, HIJAU DAN INDAH  Terwujudnya Tata Kehidupan Krama Bali yang harmonis Bali berbasis wilayah dan lingkungan  Meningkatnya keharmonisan tata keharmonisan tata kehidupan Krama Bali berbasis wilayah dan lingkungan  I Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali				
Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	2	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	
MISI 22. MENGEMBANGKAN SISTEM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG EFEKTIF EFISIEN, TERBUKA, TRANSPARAN, AKUNTABEL				

DAN BERSIH SERTA MENINGKATKAN PELAYAN PUBLIK TERPADU YANG CEPAT, PASTI DAN MURAH				
Meningkatnya kualitas pelayanan sektor publik	Meningkatnya kualitas pelayanan sektor public		1	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi lembaga pemerintah daerah
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik		1	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi
	2	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengembangan sumber pendapatan lain-lain

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Arah kebijakan nantinya juga terkait dengan horizon waktu, sehingga menjadi jelas kapan arah kebijakan tersebut dilaksanakan. Arah Kebijakan Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagai berikut.

Tabel. 2

Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Provinsi Bali

Tahun 2019-2023

	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan kualitas, distribusi dan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan	Ketersediaan hasil pertanian dalam arti luas, peternakan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan "Pangan Pokok Krama Bali"
2	Peningkatan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat	Meningkatkan keamanan dan konsumsi pangan bergizi
3	Pengendalian harga pangan terjangkau oleh Krama Bali	Stabilitas harga pangan Krama Bali
4	Membentuk yayasan terintegrasi "Yadnya Dharma Krama Bali" (atau sebutan lain yang lebih	"Yadnya Dharma Bali" (atau sebutan lain yang lebih tepat) menjadi jaringan pusat penyediaan sandang

	tepat) untuk penyediaan sandang terjangkau Krame Bali	gratis atau murah dan layak pakai Krama Bali di kab/kota Provinsi Bali	
5	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin menggunakan produk sandang	Peningkatan pemenuhan kebutuhan sandang masyarakat miskin	
6	Mempermudah sistem investasi pembangunan rumah murah layak huni Krama Bali	Meningkatkan kepemilikan rumah bagi rumah tangga Krama Bali	
7	Memberdayakan Lembaga keuangan /perbankan membangun program kredit rumah terjangkau Krama Bali	Menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai salah satu bank/sumber pendanaan bunga rendah untuk kredit rumah layak huni Krama Bali golongan ekonomi lemah (atau kelompok tertentu yang lebih tepat)	
	Strategi	Arah Kebijakan	
8	Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan	Pengenalan dan penerapan teknologi kepada petani pelaku usaha tanaman pangan dalam arti luas, perikanan dan peternakan untuk meningkatkan produksi	
		Modernisasi sistem tanaman pertanian hortikultura untuk meningkatkan hasil tanam serta menghasilkan keluaran yang berkualitas dan bernilai tambah tinggi	
9	Sistem subak sebagai tulang punggung irigasi lahan pertanian sawah Provinsi Bali	Pemberdayaan dan pembinaan komunitas/lembaga/organisasi Subak untuk memenuhi kebutuhan saluran irigasi untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian sawah kab/kota Provinsi Bali	
10	Penyediaan bibit unggul pertanian tanaman pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan yang menjadi potensi pasar lokal dan eksport	1 Bekerjasama dengan lembaga riset pemerintah/swasta atau perguruan tinggi untuk menghasilkan bibit unggul sesuai dengan kebutuhan pasar lokal dan ekspor	

		Pelindungan lahan pertanian pangan dalam arti luas, peternakan dan perikanan berkelanjutan
11	Pengembangan sistem Standar Kualitas Minimal (SKM) produk hasil pertanian tanaman pangan unggulan pasar lokal dan berorientasi ekspor	Pembinaan dan pengendalian petani untuk menghasilkan produk hasil pertaniannya sesuai dengan Standar Kualitas Minimal (SKM) untuk memenuhi kualitas pasar lokal dan ekspor
12	Pembangunan sumber daya manusia unggul dibidang pertanian dan agro industri dalam arti luas	Pengembangan kompetensi Krama Bali dibidang pertanian tanaman pangan, agro industri, pascapanen sebagai duta pengembangan masyarakat pertanian yang unggul dan berkelanjutan
13	Pemberdayaan petani menjadi produsen industri pangan olahan hasil pertanian	1 Meningkatkan kemampuan petani dengan mengenalkan industri pangan olahan hasil pertanian
		2 Membantu meningkatkan pangsa pasar lokal dan eksport produk hasil pertanian dalam arti luas
		3 Menyediakan sumber pendanaan murah untuk pengembangan usaha tani
		usana tam
	Strategi	Arah Kebijakan
14	Strategi Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali	
14	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama	Arah Kebijakan  Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi
	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali  Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali	Arah Kebijakan  Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali  Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis
15	Pendataan riwayat dan pelayanan kesehatan Krama Bali  Pemberdayaan komunitas formal dan Informal Krama Bali sebagai mensosialisasikan dan sebagai peserta jaminan kesehatan Krama Bali Sejahtera (KBS)  Menyelenggarakan proses pelayanan pendidikan yang	Arah Kebijakan  Mengembangkan sistem data base riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali  Membangun sistem data base peserta jaminan kesehatan (BPJS) Kesehatan Krama Bali pendataan Krama Bali terintegrasi riwayat dan pelayanani kesehatan terintegrasi kabupaten/kota Provinsi Bali berbasis teknologi informasi Krama Bali  1 Meningkatkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

		Sel ses	Sejahtera -II untuk bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja Provinsi Bali		
18	Mendorong pemerintah pusat pendidikan berbasis Agama Hindu tingkat sekolah dasar dan Menengah masuk dalam sistem pendidikan Nasional	per	Membangun sistem manajemen pendidikan berbasis Agama Hindu untuk diajukan kepemerintah pusat		
19	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali sebagai Enterpreneur	1	Membangun sarana prasarana untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali berjiwa wirausahawan		
	sebagai Effericui	2	Membangun hubungan kerjasama pemerintah dengan dunia usaha untuk menghasilkan wirausaha-2 baru Krama Bali		
		3	Membangun hubungan kerjasama antara Government ToGovernment (G To G) dan pemerintah dengan swasta penempatan/ penyaluran dan perlindungan Tenaga Kerja Kerama Bali di luar negeri		
20	Pemerintah daerah bersama masyarakat mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki sebagai bagian dari jaminan	1	Mengembangkan Jaminan Sosial Kesehatan/ BPJS Kesehatan Provinsi Bali		
	sosial Krama Bali	2	Memberdayakan sistem gotong royong sosial kemasyarakatan yang telah ada dan hidup pada Krama Bali		
	Strategi	Arah Kebijakan			
		3	Meningkatkan jaminan bantuan sosial kepada Krama Bali golongan keluarga miskin (Gakin)		
21	Miningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali mengisi pasar tenaga kerja domestik dan global	Membangun sistem, sarana prasaran untuk menghasilkan tenaga kerja Krama Bali unggul dan meningkatkan kesempatan kerja			
22	Meningkatkan cakupan layanan jaminan kesehatan BPJS Kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS	1	Meningkatkan cakupan jaminan kesehatan tenaga kerja Krama Bali		
	Ketenaga Kerjaan	2	Membangun hubungan kerjasama antara Government To Government (G To G) dan pemerintah dengan swasta		

		pengendalian jaminan sosial ketenagakerjaan Krama Bali bekerja diluar negeri	
23	Melembagakan dan menginternalisasi nilai nilai tradisi, seni, dan budaya melalui system pendidikan formal, non-formal dan informal	Menjadikan tradisi, seni dan budaya sebagai tata cara kehidupan Krama Bali guna memperkokoh jati diri Krama Bali dan memperkuat integritas moral Krama Bali	
24	Memelihara, merevitalisasi, dan mengembangkan tradisi, seni, sastra dan budaya masyarakat Bali	Pengembangan tata kehidupan krama Bali berdasarkan nilai-nilai Sad Kerthi	
25	Penguatan kedudukan, peran, fungsi, tugas dan wewenang Majelis Kebudayaan	Memberikan apresiasi dan fasilitasi kepada lembaga, pelaku, dan karya Seni, Sastra, dan Budaya	
26	Konservasi dan restorasi peninggalan benda cagar budaya	Melindungi peninggalan benda cagar budaya secara holistik	
27	Merancang kegiatan untuk peningkatan infrastrukutur di wilayah kawasan suci Pura	1 Meningkatkan kualitas fasilitas keagamaan	
	whayan kawasan suci i ura	2 Memperhatikan kesejahteraan dan fasilitas kehidupan kepada para Sulinggih/Pemangku	
		3 Meningkatkan sradha dan bhakti umat Hindu	
		4 Pengamanan dan perlindungan terhadap Pura dan Pratima Pura	
		5 Perlindungan terhadap aset Pura (Pelaba Pura) termasuk sertifikasi dengan Peraturan Bupati/Peraturan lainnya	
	Strategi	Arah Kebijakan	
		6 Melindungi simbol – simbol keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)	
28	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama	Meningkatkan toleransi hidup beragama	
29	Penguatan kedudukan, tugas da fungsi desa adat dan subak	1 Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi Parahyangan, Palemahan, dan	
	Memperkuat kerukunan hidup antar umat beragama Penguatan kedudukan, tugas	keagamaan yang sakral (Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota). (REGULASI) (Rancangan Pergub tentang simbul simbul keagamaan)  Meningkatkan toleransi hidup beragama  1 Memperkuat Desa Adat dalam melaksankana fungsi	

			Pawongan, serta awig-awig dan pararem, sehingga Desa Adat akan berdiri kokoh dan bisa berjalan secara paralel dengan Desa
		2	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pendidikan berbasis keagamaan Hindu (khususya pendidikan non-formal)
		3	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Pelestarian dan pembinaan seni, budaya, dan kearifan lokal bagi Krama Bali termasuk sekehe teruna-teruni (generasi muda)
		4	Memberdayakan Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan perekonomian rakyat (Pasar Adat, LPD, BUM Desa Adat, Toko Moderen
		5	Memperkuat dan memberdayakan organisasi sekaha teruna dan pecalang di Desa Adat sampai ke tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi
		6	Memperkuat Desa Adat sebagai tempat Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali sesuai nilai-nilai Sad Kerthi
		7	Menjadikan wantilan Desa Adat sebagai wahana Balinese Culture Meeting Point yang dilengkapi dengan Wifi gratis dan fasilitas pendukung seni budaya lainnya
		8	Memelihara, merevitalisasi dan memperkuat Hukum Adat/Awig/Perarem di Desa Adat
		9	Memberi perlindungan terhadap aset Desa (milik/Druwe Desa)
	Strategi		Arah Kebijakan
		10	Memelihara, merevitalisasi dan mengembangkan adat istiadat dan tradisi masyarakat Bali
30	Event, atraksi, pertunjukan kesenian, pameran kesenian dan kegiatan adat dan budaya	per	mberdayakan Event, atraksi, tunjukan kesenian, pameran enian dan kegiatan adat dan

	sebagai objek wisata	buo	laya mempunyai nilai ekonomis	
31	Kebudayaan kabupaten /kota yang beranekaragam Provinsi Bali sebagai produk pariwisata yang terintegrasi	buo	Pengembangan sarana prasarana budaya, adat istiadat sesuai dengan potensi daerah	
32	Mengkoordinasikan pelaku industri wisata melakukan bauran promosi (promotion mix) untuk meningkatkan pangsa pasar industri pariwisata Bali	dar	Mempromosikan distinasisi wisata dan produk pariwisata baru provinsi Bali	
33	Penyediaan sarana prasarana yang memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) pariwisata pada setiap destinasi dan produk pariwisata	par Sta yan	igendalian pelaku usaha industri iwisata melalui pemenuhan ndar minimal (SPM) Pariwisata ig ditetapkan oleh pemerintah vinsi Bali	
34	Peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui sesuai pasar kerja	1	Melakukan moratorium mengalihkan investasi dalam jumlah tertentu (atau size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara	
		2	Kemudahan perijinan usaha untuk investasi di Bali Timur dan Utara (size/jenis bisnis tertentu) ke Bali Timur dan Bali Utara	
		3	Pengembangan sumberdaya daerah dengan pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta	
35	Memperkuat dukungan regulasi perlindungan tenaga kerja lokal dan mengembangkan kerjasama ketenaga kerjaan disektor pariwisata	Membangun sarana prasarana untuk terbangunnya persepsi brand Bali untuk seluruh produk hasil produksi Provinsi Bali		
	Strategi		Arah Kebijakan	
36	Pengembangan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk untuk meningkatkan pangsa pasar	1	Melakukan pembinaan dan pendampingan usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi menghasilkan produk yang unik dan berbasis budaya Bali yang	

	lokal dan ekspor		berdaya saing tinggi
		2	Membangun sumber modal kerja mudah dan murah bagi pelaku usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
		3	Membangun sarana prasarana spesifikasi khusus/ spesifik untuk meningkatkan daya saing usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi
37	Mengembangkan promosi dan pemasaran produk usaha industri kecil dan menengah (IKM), Industri Rumah Tangga, usaha rumah tangga, usaha kecil dan menengah (UKM) dan Koperasi untuk meningkatkan pangsa pasar lokal dan ekspor	pen kec	ilitasi infrastruktur untuk Igembangan Koperasi, industri il menengah (IKM) dan Usaha Kecil nengah (UKM)
38	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi Bali	lau kor Pro	nbangunan infrastruktur darat , t dan udara yang terinteragi dan nektivitas antara kabupaten /kota vinsi Bali dengan wilayah lain di onesia
39	Pembangunan Infrastuktur untuk meningkatkan pelayanan publik	kor	nbangunan infrastruktur untuk nektivitas antar kab/kota di vinsi Bali
40	Pemberdayaan Krama Bali dan aparatur pemerintah daerah sebagai keamanan lingkungan pemukiman		ningkatkan sistem infrastruktur manan lingkungan Krama Bali
41	Peningkatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan Lembaga kepolisian untuk menciptakan rasa aman wisatawan berwisata		ningkatkan sistem infrastruktur manan Wisatawan
	Strategi		Arah Kebijakan
42	Memperkuat masyarakat Madani dalam sosial kemasyarakatan Krama Bali	pur per dala	syarakat Madani menjadi tulang nggung kehidupan demokratis, lakuan hukum yang adil, dan am menjalankan hak-hak astitusi kehidupan Krama Bali

43	Kesetaraan Gender dalam nilai-nilai tata kehidupan Krama Bali	Menyelaraskan kesetaraan Gender dalam nilai-nilai budaya Bali dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI		
44	Pemanfaatan ruang mengacu kepada tataruang yang harmonis dengan tata kehidupan Krama Bali	1	Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana untuk kehidupan Krama Bali dan pengembangan ekonomi daerah berprdoman pada tata ruang yang telah ditetapkan	
		2	Menjadikan Wilayah Bali Timur dan Bali Utara Sebagai pusat pengembangunan dan pertumbuhan ekonomi Baru	
45	Membangun lingkungan yang sehat dan nyaman	Mengendalikan prilaku Krama Bali dan pengunjung untuk menjaga lingkungan hidup pulau Bali		
46	Membangun sarana prasarana pelayanan publik yang terintegrasi antar instansi Lembaga Pemerintah Daerah	Pelayanan publik terselenggara dengan cara-cara yang efisien, efektif dan transparan		
47	Membangun sistem tata kelola yang terintegrasi	1 Penempatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kompetensinya		
		2	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sumber daya pemerintah daerah	

#### 2.2 TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Menunjuk pada Visi Misi dan Renstra Provinsi Bali maka terbentuklah tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target yang ingin dicapai Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

#### 2.2.1 Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Terwujudnya pelayanan yang profesional di Badan Penghubung Provinsi Bali.

Pelayanan yang dimaksud adalah:

 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga antara Pemerintah Provinsi Kab/kota ke Pemerintah Pusat melalui Badan Penghubung Provinsi Bali

- 2. Pelayanan profesional bagi tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali
- 3. Pelayanan promosi seni budaya untuk pengunjung Anjungan Bali TMII
- 4. Pelayanan pembinaan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta

#### 2.2.2 Sasaran

Adapun yang menjadi sasaran Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi
Bali dengan indikator kinerja berupa indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
Badan Penghubung Provinsi Bali.

#### 2.3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN

Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas rencana kinerja Badan Penghubung Provinsi Bali dikembangkan kedalam kebijakan, program dan kegiatan.

#### 1. Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat taktis strategis yang diambil dan ditetapkan untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Penghubung Provinsi Bali, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan koordinasi antar lembaga/kementerian/ non kementerian dari daerah ke pusat yang terselesaikan dengan baik
- b. Meningkatkan frekuensi promosi informasi tentang kebudayaan dan pariwisata Bali di Jakarta
- c. Meningkatkan frekuensi pembinaan masyarakat Bali di Jakarta
- d. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada tamu wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.

#### 2. Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan. Program ini merupakan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, dilaksanakan 2 program antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Pelayanan Penghubung

#### 3. Kegiatan

Untuk mendukung pelaksanaan kedua program di atas ada 7 kegiatan yang dilaksanakan, sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Dan 26 Sub kegiatan:

- 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 8. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 9. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 10. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
- 11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 13. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 14. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 16. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 24. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat
- 25. Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya
- 26. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

#### 2.4 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.

IKU Badan Penghubung Provinsi Bali adalah:

Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali, pelayanan yang dimaksud adalah :

1 Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga

- 2 Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya
- 3 Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta
- 4 Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali

#### 2.5 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Adapun Penetapan Kinerja Tahun 2021 pada Badan Penghubung Provinsi Bali sebagai berikut :

TABEL 3
PENETAPAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas	Indeks kepuasan	80
pelayanan yang profesional	masyarakat terhadap	
pada Badan Penghubung	pelayanan Badan	
Provinsi Bali	Penghubung Provinsi Bali	

#### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### 3.1 EVALUASI KINERJA

Untuk melihat sampai sejauh mana pencapaian pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dilakukan metode pengukuran kinerja kegiatan. Atas dasar dari hasil-hasil yang diperoleh dari pengukuran kinerja kegiatan, selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja sasaran, melalui indikator-indikator kinerja pencapaian sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja.

Pengukuran kinerja merupakan pembandingan antara target kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (*performance result*). Dengan pembandingan tersebut dapat diketahui celah kinerja (*performance gap*) yang kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab ketidakberhasilan, dan selanjutnya terhadap kekurangan yang terjadi akan ditetapkan strategi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

#### 3.2 ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 tidak hanya berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam, serta sejauh mana realisasi sasaran dalam Renstra Badan Penghubung Provinsi Bali dapat terwujud.

## TABEL 4 CAPAIAN SASARAN

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja	Target	Realisasi s.d	Tahun 2021		
Utama	Renstra	<b>Tahun 2021</b>			Compien
			Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan	90	84,91	80	84,91	106,14%
masyarakat terhadap					
pelayanan Badan					
Penghubung Provinsi					
Bali :					
1. Indeks kepuasan		85,50			
penerima					
pelayanan					
Hubungan Antar					
Lembaga					
2. Indeks kepuasan		92,51			
masyarakat					
terhadap					
pembinaan					
masyarakat Bali di					
Jakarta melalui					
Badan					
Penghubung					
3. Indeks kepuasan		73,29			
masyarakat					
terhadap					
pelayanan promosi					
dan informasi di					
Anjungan Daerah					
Bali di Jakarta					
4. Indeks		88,33			
kepuasan					
pelanggan tamu					
wisma di Badan					
Penghubung					
Provinsi Bali					
			1	•	•

Berdasarkan data di atas capaian/realisasi indikator kinerja Tahun 2021 untuk sasaran strategis dapat dicapai dengan baik bahkan melampaui target yaitu dengan persentase capaian 106,14%. Dengan target nilai IKM 80 di Tahun 2021 ternyata penilaian IKM rata-rata pelayanan di Badan Penghubung sudah mencapai 84.91. Nilai IKM paling tinggi dicapai dari pelayanan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta dan terendah dari pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta, hal ini dikarenakan minimnya pelaksanaan dan promosi seni yang menarik minat pengunjung ke Anjungan Bali. Perhitungan IKM sudah sesuai dengan Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK.

#### 3.3 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Perbandingan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2020, dapat dilihat bahwa Tahun 2021 ini realisasi Indeks kepuasan penerima pelayanan menurun tapi masih diatas target. Hal ini dikarenakan banyaknya rencana kegiatan peningkatan pelayanan harus ditunda karena efek pandemik maupun refocusing anggaran

TABEL 5.
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2020	Realisasi Tahun 2020	Capaian Tahun 2020	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	75	85.96	114.60%	80	84,91	106,14%

## 3.4 PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA

Untuk perbandingan capaian sasaran strategis tahun berjalan Renstra dalam hal ini yaitu tahun 2021 dengan target Renstra 2019-2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali

TABEL 6
PERBANDINGAN CAPAIAN TARGET TAHUN 2021 DENGAN TARGET RENSTRA

Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi s.d	Persentase capaian
	Renstra	Tahun 2021	akhir tahun Renstra
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan	90	84,91	89,38%
Penghubung Provinsi Bali			

Sampai dengan Tahun 2021 ini pencapaian target Renstra tiap tahunnya sudah sesuai dengan harapan.

#### 3.5 ASPEK PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Aspek Pendukung:

1. Kuantitas (jumlah) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas, dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali sejumlah 45 orang dengan rincian :

TABEL 7
KUANTITAS SDM

NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	Berdasarkan Pangkat/Golongan:	
	- Pembina Tk. I	1 orang
	- Penata Tk.I/ IIId	4 orang
	- Penata/ IIIc	3 orang
	- Penata Muda Tk.I/ IIIb	1 orang
	- Penata Muda/ IIIa	3 orang
	- Pengatur Tk I/ IId	2 orang
	- Pengatur/ IIc	2 orang
	- Pengatur Muda Tk.I/ IIb	1 orang
	- Pengatur Muda/ IId	1 orang

2.	Berdasarkan Eselon:	
	Eselon III a	1 orang
	Eselon IV a	3 orang
3.	Tenaga Kontrak	27 orang

#### 2. Sarana dan prasarana

Untuk menunjang pencapaian target sasaran strategis Badan Penghubung Provinsi Bali telah mempunyai sarana dan prasarana pendukung yang berada di wisma Badan Penghubung Provinsi Bali di Cikini maupun di Anjungan Daerah Bali TMII sebagai berikut :

- 1. Gedung wisma dengan kapasitas 14 kamar
- 2. Ruang Kantor di Cikini dan Anjungan Daerah Bali TMII
- 3. Aula/auditorium di Cikini
- 4. Kendaraan roda 4 (mobil) sejumlah 11
- 5. Kendaraan roda 2 (motor) sejumlah 2
- 6. Wantilan di anjungan Bali untuk pementasan seni
- 7. Panggung terbuka untuk pementasan seni
- 8. Brosur dan pamflet promosi dan informasi kebudayaan Bali

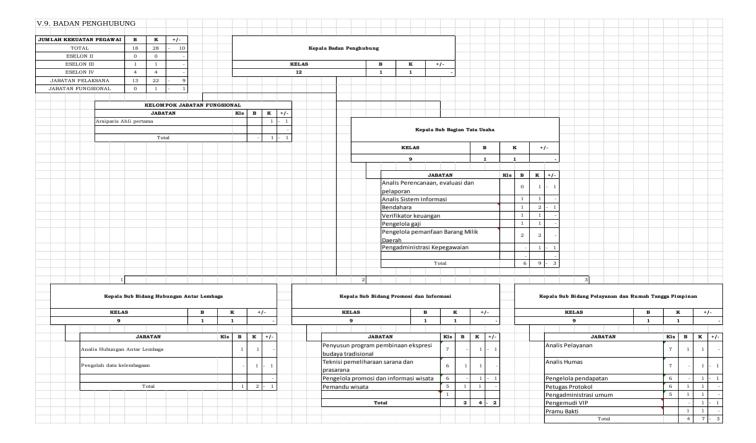
Namun selain aspek pendukung diatas juga terdapat beberapa aspek penghambat dalam pencapaian target sasaran strategis, yaitu :

#### Aspek Penghambat:

1. Kualitas (kompetensi) Sumber Daya Manusia

Dari ke-18 PNS yang terdapat di Badan Penghubung Provinsi Bali, 3 (tiga) orang diantaranya bekerja di anjungan Bali TMII dibawah Sub Bidang Promosi dan Informasi, 2 (dua) orang dibawah Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, 4 (empat) orang di bawah Sub Bidang Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan dan 7 (tujuh) orang PNS bertugas di Subbag Tata Usaha. Kualifikasi pendidikan dari PNS di Badan Penghubung Provinsi Bali sangat jauh dari harapan dan kebutuhan analisis jabatan dan beban kerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Padahal sangat banyak keahlian yang dibutuhkan dalam mewujudkan sasaran yang telah

ditentukan OPD. Dari ke-18 PNS di Tahun 2021 hanya 6 (enam) orang yang berpendidikan sampai dengan S-2, 4 (empat) orang berpendidikan S1 dan yang lainnya dengan tingkat pendidikan setara SMA dan belum meningkatkan kapasitasnya demi kualitas pribadi untuk menunjang kualitas SDM di Badan Penghubung Provinsi Bali. Sesuai dengan Analisis Jabatan diperlukan setidaknya 28 PNS dengan kualifikasi tertentu di Badan Penghubung Provinsi Bali (sesuai peta jabatan terlampir).



## 2. Anggaran

Secara keseluruhan anggaran sangat berpengaruh terhadap capaian sasaran strategis. Di Tahun 2021 demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ada beberapa hal yang kami laksanakan terkait anggaran yaitu:

- 1. Menganggarkan pemeliharaan wisma, bangunan Anjungan Bali TMII dan asrama mahasiwa Bali di Jakarta mengingat semua bangunan yang dikelola sudah tua dan perlu banyak perbaikan demi kenyamanan penerima pelayanan. Namun di Tahun ini pemeliharaan hanya dilaksanakan bagi sarana atau bangunan yang sangat urgent saja karena adanya refocusing anggaran sehingga masih banyak sarana yang belum terpelihara dengan baik
- 2. Untuk meningkatkan indeks kepuasan pelayanan promosi dan informasi kebudayaan dan pariwisata Bali juga sangat tergantung anggaran karena menyangkut dengan jumlah pagelaran dan pementasan-pementasan seni yang sanggup diselenggarakan oleh anjungan Daerah Bali. Karena dengan pagelaran seni tersebut sangat efektif untuk menarik kunjungan dan memberi kepuasan kepada tamu Anjungan Bali TMII.
- 3. Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat melalui pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali di Tahun 2021, kami hanya menyelenggarakan 1 (satu) kegiatan yaitu Seminar Pinandhita dan Serati Banten se-Jabodetabek karena keterbatasan anggaran. Diharapkan di tahun-tahun mendatang anggaran akan diberikan lebih besar sehingga kami bisa menyelenggarakan pembinaan yang lebih variatif dan bermanfaat bagi masyarakat Bali di Jakarta.

## 3.6 REALISASI ANGGARAN

#### a. Pendapatan Daerah.

Pendapatan Daerah Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun Anggaran 2021 dengan target Rp. 44.000.000,- terealisasi sebesar Rp.34.750.000,- atau 78,98%. Seluruh pendapatan daerah tersebut merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2020 dimana targetnya Rp. 121.800.000 terealisasi sebesar Rp. 49.650.000,- atau 41,03%. Terjadi penurunan penerimaan PAD yang signifikan hal ini disebabkan selain karena:

1. Ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas yang menyebutkan bahwa biaya penginapan diterapkan secara real cost dan ditetapkan besaran

yang cukup besar di DPA sehingga banyak PNS lebih memilih penginapan/hotel yang memiliki fasilitas lebih nyaman dibandingkan wisma Badan Penghubung Bali

- 2. Adanya pandemik Covid 19 yang membuat berkurangnya tamu yang bepergian secara signifikan
- 3. Sudah tidak ada lagi penerimaan sewa kantin di tahun 2021, sewa kantin sudah tidak bisa lagi dipungut karena kantin di Anjungan Daerah Bali sudah dialihfungsikan menjadi etalasi barang-barang kesenian

Namun Badan Penghubung tetap berbenah agar tamu merasa nyaman dan aman dengan menampilkan suasana kental Bali yang eksotik di tengah Ibukota Jakarta.

TABEL 8.
REALISASI PENDAPATAN

NO	URAIAN	TARGET ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REAL Rp	ISASI %
1	Pendapatan Asli Daerah	44.000.000,00	34.750.000,00	78,98

## b. Belanja Daerah

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja. Belanja daerah tahun 2021 dengan target anggaran Belanja Langsung setelah perubahan sebesar Rp. 7.061.674.639,- realisasinya sebesar Rp. 6.516.888.700,- atau 92,29%. Bila dibandingkan Tahun 2020 dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 7.802.451.832,51,- realisasinya sebesar Rp., 7.518.627.643,- atau 96,36% penyerapan anggaran Tahun 2020 lebih baik dari Tahun 2021 karena banyak efisiensi yang harus dilaksanakan di Tahun 2021.

Perbandingan rincian Belanja Langsung yang menunjang pencapaian target sasaran strategis sebagai berikut :

TABEL 9
REALISASI BELANJA LANGSUNG

NO.	Kegiatan	TA	AHUN 2020		Tz	AHUN 2021	
		TARGET	REALISASI	%	TARGET	REALISASI	%
1.	PROGRAM RUTIN 2020 :	6.794.863.624,51	6.556.874.663	96,49			
	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja  2021: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				6.116.400.799,00	5.576.853.002,00	91,18
2.	PROGRAM PRIORITAS  2020:  Program Pelayanan Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah  2021:  Program Pelayanan Penghubung	1.007.588.208,00	961.752.980,00	95,45	945.273.840,00	940.035.698,00	91,00

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Secara umum program kerja Badan Penghubung Provinsi Bali dalam Tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik dengan segala keterbatasan yang ada pada Badan Penghubung Provinsi Bali. Langkah-langkah konkret yang dilaksanakan di Tahun 2021 untuk lebih memaksimalkan pencapaian kinerja di tahun-tahun mendatang, yaitu:

- Mengupayakan peningkatan sarana dan prasarana wisma Badan Penghubung dengan pemeliharaan gedung wisma dan peningkatan peralatan dan perlengkapan pendukung gedung wisma sehingga bisa meningkatkan kepuasan pelanggan wisma Badan Penghubung Provinsi Bali.
- 2. Penambahan kegiatan pagelaran seni dan pembinaan-pembinaan masyarakat Bali di Jakarta baik secara offline maupun online sebagai sarana pengembangan seni, adat dan budaya Bali di Jakarta dengan sasaran meningkatnya kepuasan pengunjung Anjungan Bali TMII dan meningkatnya kepuasan masyarakat Bali di Jakarta atas kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Bali.
- 3. Untuk kendala yang paling mendasar dalam pelaksanaan aktivitas kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Bali adalah keterbatasan kualitas pegawai/sumber daya manusia. Namun saat ini upaya-upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas SDM Badan Penghubung Provinsi Bali yaitu dengan lebih intensif mengikuti bimtek-bimtek atau pelatihan maupun workshop yang diselenggarakan oleh BKPSDM Provinsi Bali atau instansi lainnya agar pengetahuan SDM lebih luas dan dapat mendukung pencapaian organisasi. Selain itu solusi yang kami lakukan untuk mengisi kebutuhan SDM adalah dengan merekrut tenaga kontrak dengan kompetensi tertentu.













# PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

# **TAHUN 2021**

# BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

		SUB KEGIATAN				% PENCAPAIAN RENCANA	
PROGRAM	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
PROGRAM	1. Penyusunan Dokumen	Input: Dana	Rupiah	3.748.400	3.748.400	100	
PENUNJANG	Perencanaan Perangkat Daerah	Output:					
URUSAN		Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	100	
PEMERINTAHAN DAERAH		Outcome:					
PROVINS		Meningkatnya kualitas dokumen					
		perencanaan, penganggaran dan evaluasi	%	100	100	100	
		kinerja perangkat			_	_	
	2. Koordinasi dan Penyusunan	Input: Dana	Rupiah	0	0	0	
	Dokumen RKA-SKPD	Output:	1 1			100	
		Jumlah dokumen RKA SKPD	dokumen	1	1	100	
		Outcome:	%	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	90	100	100	100	
		kinerja perangkat					
		amerja perangkai					
	3. Koordinasi dan Penyusunan	Input: Dana	Rupiah	0	0	0	
	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Output:	_				
		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD	dokumen	1	1	100	
		Outcome:					
		Meningkatnya kualitas dokumen	%	100	100	100	
		perencanaan, penganggaran dan evaluasi					
		kinerja perangkat					

4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-	Input: Dana	Rupiah	0	0	0	
SKPD	Output:					
	Jumlah dokumen DPA SKPD	dokumen	1	1	100	
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas dokumen	%	100	100	100	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi					
	kinerja perangkat					
5. Koordinasi dan Penyusunan	Input: Dana	Rupiah	0	0	0	
Perubahan DPA-SKPD	Output:					
	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD	dokumen	1	1	100	
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas dokumen	%	100	100	100	
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi					
	kinerja perangkat					
6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Input: Dana	Rupiah	870.300	870.300	100	
	Output:					
	Jumlah dokumen Evaluasi kinerja Perangkat	dokumen	1	1	100	
	Daerah					
	Outcome:	%	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas dokumen					
	perencanaan, penganggaran dan evaluasi					
	kinerja perangkat					
7. Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Input: Dana	Rupiah	4.034.871.603	3.586.639.831	88,89	
ASN	Output:					
	Jumlah pegawai yang menerima gaji dan	orang	18	18	100	
	tunjangan					
	Outcome:	%	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas dokumen					
	administrasi keuangan					
8. Pelaksanaan Penatausahaan dan	Input: Dana	Rupiah	870.300	870.300	100,00	
Pengujian/Verifikasi Keuangan	Output:					
SKPD	Jumlah dokumen keuangan yang	dokumen	12	12	100	
	diverifikasi					
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas dokumen	%	100	100	100	
	administrasi keuangan					

9. Koordinasi dan Pelaksanaan	Input: Dana	Rupiah	694.800	694.800	100,00	
Akuntansi SKPD	Output:					
	Jumlah dokumen Akuntansi keuangan	dokumen	1	1	100	
	SKPD					
	Outcome:	0/	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas dokumen	%	100	100	100	
10. Pengelolaan dan Penyiapan	administrasi keuangan Input: Dana	Rupiah	0	0	0	
Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Output:	Kupian	U	U	U	
Banan Tanggapan Temenksaan	Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	dokumen	1	1	100	
	Outcome:	donamen		1	100	
	Meningkatnya kualitas dokumen	%	100	100	100	
	administrasi keuangan					
11. Penyediaan Komponen Instalasi	Input: Dana	Rupiah	10.482.000	10.482.000	100	
Listrik/Penerangan Bangunan	Output:					
Kantor	Jumlah komponen listrik/ penerangan	Jenis	5	5	100	
	bangunan kantor					
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	%	100	100	100	
	administrasi umum yang mendukung					
12 Danvedieen Dansleten den	kelancaran kantor	Dymioh	14.947.000	14.947.000	100	
12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Input: Dana Output:	Rupiah	14.947.000	14.947.000	100	
i enengkapan Kantoi	Jumlah Peralatan dan PerlengkapanKantor	Jenis	3	3	100	
	yang tersedia	301113		3	100	
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	%	100	100	100	
	administrasi umum yang mendukung					
	kelancaran kantor					
13. Penyediaan Bahan Logistik	Input: Dana	Rupiah	80.000.000	80.000.000	100,00	
Kantor Bandin Eogistik	Output:	Kupian	00.000.000	00.000.000	100,00	
	Jumlah Jenis sesajen untuk upacara	Jenis	2	2	100	
	keagamaan		_	_		
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	%	100	100	100	
	administrasi umum yang mendukung					
	kelancaran kantor					

14. Penyediaan Barang Cetakan dan	Input: Dana	Rupiah	4.892.300	4.892.300	100,00	
Penggandaan	Output:	_				
	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Jenis	6	6	100	
	dokumen					
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	%	100	100	100	
	administrasi umum yang mendukung					
	kelancaran kantor					
15. Penyediaan Bahan Bacaan dan	Input: Dana	Rupiah	2.340.000	2.340.000	100,00	
Peraturan Perundang-undangan	Output:					
	Tersedianya bahan bacaan/ koran	Bulan	12	12	100	
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas pelayanan					
	administrasi umum yang mendukung	%	100	100	100	
	kelancaran kantor					
16. Penyelenggaraan Rapat	Input: Dana	Rupiah	30.458.000	10.088.400	33,12	
Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output:					
	Jumlah laporan perjalanan dinas untuk	Bulan	12	12	100	
	koordinasi dan konsultasi					
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas pelayanan	%	100	100	100	
	administrasi umum yang mendukung					
	kelancaran kantor					
17. Pengadaan Sarana dan Prasarana	Input : Dana	Rupiah	75.982.000	75.981.999	100	
Pendukung Gedung Kantor atau	Output:	T Tools	4	4	100	
Bangunan Lainnya	Jumlah unit pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Unit	4	4	100	
	Outcome:					
	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	%	100	100	100	
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Input : Dana	Rupiah	5.643.800	5.621.300	99,60	
	Output:  Jumlah jasa pengiriman surat menyurat	Bulan	12	12	100	
	yang dibayar tepat waktu	Duiaii	12	12	100	
	Jumlah materai yang tersedia	lembar	270	270	100	
	Outcome:					
	meningkatnya kualitas jasa penunjang	%	100	100	100	
	urusan pemerintahan daerah					

19. Penyediaan Jasa Komunikasi,	Input : Dana	Rupiah	200.000.000	151.900.079	75,95	
Sumber Daya Air dan Listrik	Output :					
	Jumlah penyediaan jasa komunikasi sumber	Bulan	12	12	100	
	daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu					
	Outcome:					
	meningkatnya kualitas jasa penunjang	%	100	100	100	
	urusan pemerintahan daerah					
20. Penyediaan Jasa Pelayanan	Input : Dana	Rupiah	808.383.984	794.046.684	98,23	
Umum Kantor	Output:					
	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang	Bulan	12	12	100	
	dibayar tepat waktu					
	Outcome:					
	meningkatnya kualitas jasa penunjang	%	100	100	100	
	urusan pemerintahan daerah					
21. Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Input : Dana	Rupiah	730.457.544	727.407.271	99,58	
Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Output :					
Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah unit kendaraan dinas yang	unit	13	13	100	
Kendaraan Dinas Jabatan	terpelihara dengan baik					
	Outcome:					
	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	%	100	100	100	
22 D 17 D 1 1 77 C		D 11	25,000,000	25 000 000	100	
22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Input : Dana	Rupiah	35.000.000	35.000.000	100	
dan Prasarana Gedung Kantor atau	Output:	D 1	10	10	100	
Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana gedung kantor dan	Bulan	12	12	100	
	bangunan lainnya dalam kondisi baik					
	Outcome:	0/	100	100	100	
	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah	%	100	100	100	
23. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	Input : Dana	Rupiah	76.758.768	71.322.636	92,92	
dan Prasarana Pendukung Gedung	Output:	Kupian	70.736.708	/1.322.030	92,92	
		Bulan	12	12	100	
Kantor atau Bangunan Lainnya	sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi	Dulali	12	12	100	
	baik					
	Outcome :					
	Meningkatnya kualitas Barang Milik	%	100	100	100	
	Daerah	/0	100	100	100	

PROGRAM	24. Peningkatan Kualitas Pelayanan	Input: Dana	Rupiah	36.560.000	36.450.000	99,70	
PELAYANAN	Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Output:					
PENGHUBUNG		Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat	kali	1	1	1	
		Bali di Jakarta					
		Outcome:					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap	indeks	80	89	111,25	
		pelayanan Badan Penghubung					
	25. Kegiatan Fasilitasi Pameran	Input: Dana	Rupiah	128.718.768	128.713.138	99,99	
	Produk Unggulan dan pelestarian	Output:					
	Seni Budaya	Jumlah kegiatan pagelaran seni	kali	1	1	100	
		Jumlah kegiatan pelestarian seni (latihan	bulan	12	12	100	
		tari					
		Bali)					
		Outcome:					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap	indeks	80	73,29	91,61	
		pelayanan Badan Penghubung					
	26. Koordinasi dan Sinkronisasi	Input: Dana	Rupiah	779.995.072	774.872.560	99,70	
	Pelaksanaan Pelayanan	Output:					
	Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan	bulan	12	12	100	
		pelayanan penghubung berjalan dengan baik					
		Outcome:					
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap	indeks	80	88,33	110,41	
		pelayanan Badan Penghubung					

# PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN 2021

SKPD: BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	TARGET	REALISASI	%PENCAPAIAN TARGET	KET
profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali:  1. Indeks kepuasan penerima pelayanan Hubungan Antar Lembaga 2. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan masyarakat Bali di Jakarta melalui Badan Penghubung 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan promosi dan informasi di Anjungan Daerah Bali di Jakarta  4. Indeks kepuasan pelanggan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali	80	84,91	106,14%	



### **KEPUTUSAN**

#### KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

#### NOMOR 1166 TAHUN 2021

### **TENTANG**

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI TAHUN 2018-2023

#### KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

## Menimbang

- bahwa dalam rangka penjabaran visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Badan Penghubung Provinsi Bali agar selaras dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2019-2023;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019-2023.

### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- Undang-Undang 8. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8);
- 16. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Perubahan Rencana Strategis pada Badan Penghubung

Provinsi Bali Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis merupakan acuan yang

digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan

Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja

lima tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran,

menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan

akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian

kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi

Bali Tahun 2019 - 2023.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap

pencapaian kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan sub

bagian/sub bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan

Penghubung Provinsi Bali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 3 Juni 2021

BADAN PENGHUBUNG

PROMUS BALI

USTINGURAH WIBAWA,S.Sos.,MSi

FMRINA

BADAN PENGHUBUNG

NIP. 19631215 198903 1 015

#### Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
- 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
- 3. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
- 5. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar.

	Tujuan		Sasaran	Stategis			Target			Strate	egi
Uraian	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Uraian	Indikator Kinerja	2019	2020	2021	2022	2023	Kebijakan	Program
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Terwujudnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	1. Indeks kepuasan penerima pelayanan hubungan antar lembaga 2. Indeks kepuasan pelanggan wisma 3. Indeks kepuasan pengunjung Anjungan Daerah Bali TMII 4. Indeks kepuasan peserta kegiatan terhadap pembinaan yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung	3 90	Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada Badan Penghubung Provinsi Bali	6 70	7 75	8 80	9 90	90	11 1. Meningkatkan kualitas koordinasi antar lembaga/ kementerian dan pihak swasta untuk kelancaran urusan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat 2. Meningkatkan pelayanan yang optimal kepada tamu dan pimpinan 3. Meningkatkan frekuensi dan kualitas promosi dan informasi serta pembinaan tentang kebudayaan dan	Program Pelayanan Penghubung
										pariwisata Bali di Jakarta	



#### **KEPUTUSAN**

### KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

## NOMOR 050/ 01 /BPPROV

#### **TENTANG**

## INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

### KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

### Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali Tentang Indikator Kinerja Utama pada Badan Penghubung Provinsi Bali.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4815);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturanm Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 16);
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 1
- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda No 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penghubung

Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA: Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang

digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Penghubung Provinsi Bali untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan

Penghubung Provinsi Bali Tahun 2019 – 2023.

KETIGA : Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap

pencapain kinerja dikoordinasikan oleh setiap pimpinan bagian/bidang dan disampaikan kepada Kepala Badan

Penghubung Provinsi Bali

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2020

PROZINSI BALI

BADAN PENCHUBUNG

I Gus i Wgurah Wibawa, S.Sos., M.Si
Pembina

19631215 198903 1 015

Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
- 2. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar.
- 3. Kepala BPKP Perwakilan Bali di Denpasar.
- 4. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali, di Denpasar.
- 5. Kepala BPKAD Provinsi Bali di Denpasar
- 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Bali di Denpasar.
- 7. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali di Denpasar (3 exemplar).

## INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI PERIODE 2019-2023

Tugas Pokok Badan Penghubung Provinsi Bali adalah:

Membantu Gubernur Bali dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah di Ibu Kota Negara. Fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali adalah :

- 1. Perumusan kebijakan teknis dan pelayanan penunjang sesuai dengan tugas Badan
- 2. Pengelolaan pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi Badan
- 3. Pelaksanaan urusan Tata Usaha

Sasaran strategis	Indikator kinerja utama	Penjelasan (alasan)	Penanggungjawab	Sumber data	keterangan
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kualitas pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Provinsi Bali	<ol> <li>Pelayanan koordinasi hubungan antar lembaga</li> <li>Pelayanan pembinaan umat/masyarakat Bali di Jakarta melalui kegiatan pelestarian dan aktualisasi adat dan budaya</li> <li>Pelayanan promosi dan informasi melalui berbagai pagelaran seni budaya di Anjungan Daerah Bali di Jakarta</li> <li>Pelayanan terhadap pimpinan (protokoler) dan tamu wisma di Badan Penghubung Provinsi Bali</li> </ol>	Subbid Hubungan Antar Lembaga  Subbid Promosi dan Informasi  Subbid Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	Survey Kepuasan Masyarakat pada Badan Penghubung Provinsi Bali dan Anjungan Daerah Bali TMII, sesuai Permenpan No 14 Tahun 2017	Program pelayanan komunikasi dan penyebarluasan informasi potensi daerah

HJakarta, 31 Desember 2019

pala Badan Penghubung Provinsi Bali

I GUST MGURAH WIBAWA, S.Sos., M.Si

PEMBINA NP. 19631215 198903 1 015

BADAN PENGHUBUNG

						Indikator Kinerja				Rencan	a Tahun 2021	L			Prakiraan Maju	ı Rencana Tal	nun 2022
				Urusan/ Bidang Urusan					Targ	et Capaian Ki	inerja			Catatan	Target Capaian Ki	nerja	
	Ко	de		Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
5				UNSUR PENUNJANG URU	JSAN PEMERINTAHAN			-	•	•	•			•		•	
07				PENGELOLAAN PENGHUE	BUNG							8,191,108,364	ı				9,276,461,248
07	01			PROGRAM PENUNJANG U	URUSAN PEMERINTAHAN D	AERAH PROVINSI						7,038,528,943	3				7,576,461,248
07	01	1.0	)1	Perencanaan, Pengangga	ran, dan Evaluasi Kinerja Per	angkat Daerah						13,561,500					18,000,000
5 07	01	1.0	01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen perencanaan yang memadai		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	2 dokumen		9,210,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	10,000,000
5 07	01	1.0	01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen RKA SKPD		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,600,000
5 07	01	1.0	01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen RKA perubahan SKPD		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,600,000
5 07	01	1.0	01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen DPA SKPD		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,600,000
5 07	01	1.0	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen DPA perubahan SKPD		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,600,000
5 07	01	1.0	01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,600,000
. 07	01	1.0	)2	Administrasi Keuangan Pe	erangkat Daerah							4,699,607,465	;		1		4,892,961,248

				.07.0.00.0.00.01.00 Badan Pe		Indikator Kinerja				Rencan	a Tahun 2021	L			Prakiraan Maju	Rencana Tah	un 2022
				Urusan/ Bidang Urusan					Targ	jet Capaian Ki	nerja			Catatan	Target Capaian Kir	erja	
	K	ode		Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Drogram Cub		Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	l l	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
5 0	7 01	1.0	2 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah dokumen SPP/SPM Gaji dan Tunjangan ASN		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	50 dokumen		4,697,172,065	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	4,885,861,248
5 0	7 01	1.0	2 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah dokumen keuangan yang diverifikasi		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	4,500,000
5 0	7 01	1.0	2 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah Dokumen Laporan Akuntansi		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12 dokumen		694,800	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,000,000
5 0	7 01	1.0	2 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	1 dokumen		870,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	1,600,000
5 0	7 01	1.0	6	Administrasi Umum Perar	ngkat Daerah							217,236,756					292,000,000
5 0	7 01	1.0	6 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	14 jenis		10,482,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	25,000,000
5 0	7 01	1.0	6 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung yang tersedia		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 jenis		30,674,472	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	35,000,000
5 0	7 01	1.0	6 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah penyediaan jenis sesajen untuk upacara keagamaan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	3 jenis		83,796,662	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	85,000,000

						Indikator Kinerja				Rencan	na Tahun 2021	L			Prakiraan Maju	Rencana Ta	hun 2022
				Urusan/ Bidang Urusan				Lakasi	Targ	et Capaian K	inerja			Catatan	Target Capaian Kir	nerja	Vahutuhan Dana/
	Kode			Dan Program/ Regiatan	Canaian Draggan	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Penting	Tolok Ukur	Target	Pagu Indikatif (Rp.)
5 07	01	1.00	6 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah barang cetakan dan penggandaan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	7 jenis		8,138,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	20,000,000
5 07	01	1.00	6 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	4 jenis		5,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	7,000,000
5 07	01	1.00	6 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah laporan perjalanan dinas konsultasi dan koordinasi jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi jumlah penyediaan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan 50 orang 200 kotak		79,145,322	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	120,000,000
07	01	1.0	7	Pengadaan Barang Milik I	Daerah Penunjang Urusan Pe	emerintah Daerah						132,000,000					200,000,000
5 07	01	1.07	7 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	5 unit		132,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	200,000,000
5 07	01	1.0	8	Penyediaan Jasa Penunjar	ng Urusan Pemerintahan Dae	erah		1				1,020,181,173					1,108,500,000
5 07	01	1.08	8 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	jumlah materai yang tersedia Jumlah penyediaan jasa pengiriman surat menyurat yang dibayar tepat waktu		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		600 buah 12 bulan		7,700,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	8,500,000
5 07	01	1.08	8 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar tepat waktu		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		200,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	250,000,000
5 07	01	1.08	8 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang dibayar tepat waktu		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		12 bulan		812,481,173	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	850,000,000

						Indikator Kinerja				Rencan	a Tahun 202	1			Prakiraan Maji	ı Rencana Tal	nun 2022
				Urusan/ Bidang Urusan					Targ	et Capaian Ki	inerja			Catatan	Target Capaian Ki	nerja	
			Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Catatan Penting	Tolok Ukur	Target	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
5 07	01	1.09	9 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Jumlah unit kendaraan dinas yang terpelihara dengan baik		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	13 unit		806,497,300	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	850,000,000
5 07	01	1.09	9 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12 bulan		35,000,000	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	65,000,000
5 07	01	1.09	) 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	Sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya dalam kondisi baik		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0	12 bulan		114,444,749	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Persentase tingkat kepuasan pelayanan di bidang administrasi umum, keuangan dan aset setda serta pelayanan rumah tangga di lingkungan setda provinsi bali	0	150,000,000
5 07	02			PROGRAM PELAYANAN P	ENGHUBUNG							1,152,579,421	L				1,700,000,000
5 07	02	1.01	1	Pelaksanaan Pelayanan Pe	enghubung							1,152,579,421	L				1,700,000,000
5 07	02	1.01	01	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah kegiatan pembinaan masyarakat Bali di Jakarta		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Nilai	2 kali		94,102,500	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	: 85 Nilai	150,000,000
5 07	02	1.01	L 04	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan pelestarian Seni Budaya	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Jumlah kegiatan pelestarian seni budaya yang diselenggarakan		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Nilai	2 kali		149,744,717	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	: 85 Nilai	450,000,000
5 07	02	1.01	L 05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan penghubung dilaksanakan dengan baik		Semua Kabupaten/Ko ta, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	80 Nilai	12 bulan		908,732,204	PENDAPATA N ASLI DAERAH (PAD)		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung	: 85 Nilai	1,100,000,000
		1			·	<del></del>		-!			TOTAL	8,191,108,364	,		-1	+	9,276,461,248



#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: ARIFIN EFENDI

Jabatan

: KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama

: WAYAN KOSTER

Jabatan

: GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

**GUBERNUR BALI** 

Jakarta, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN

WAYAN KOSTER

ARIFIN/EFEND

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	90

PER MARKE	m
Progra	

## Anggaran (Rp)

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

6.597.664.389,-

2. Pelayanan Penghubung

1.034.004.860,-

GUBERNUR BALI

Jakarta, 3 Januari 2022 KEPALA BADAN PENGHUBUNG

PROVINSI BALI

WAYAN KOSTER

ARIFIN EFENDI

NIP. 19710714 200003 1 003



# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan awatabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

: I GUSTI NGURAH WIBAWA

Jabatan

: KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Mama

: WAYAN KOSTER

Jiahatan

: GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan perpajan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Phak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi beradap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 4 Januari 2021

Frak Kedua,

SUBERNUR BALI

AYAN KOSTER

Pihak Pertama,

BADAN

GUS TAGURAH WIBAWA

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	80

Program

Anggaran (Rp)

1 Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

7.094.285.165,-

2 Pelayanan Penghubung

1.152.545.900,-

GUBERNUR BALI

BADAN PENGHUNDING

Hakarta, 4 Januari 2021 KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROWNSI BALI

WAYAN KOSTER

I GUSTINGURAH WIBAWA NID 19631215 198903 1 015

# PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BADAN PENGHUBUNG PROVINSI BALI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya pelayanan yang profesional pada Badan Penghubung Provinsi Bali	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan penghubung Provinsi Bali	80

Program

Anggaran (Rp)

1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

7.094.285.165,-

2. Pelayanan Penghubung

1.152.545.900 -

GUBERNUR BALL

WAYAN KOSTER

Harada 4 Januari 2021 KERALA BADAN PENGHUBUNG PROWNS BALI

Z BADAN FRINGHUM

I GUST NGURAH WIBAWA

9831215 198903 1 015